

ANALISIS EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO

ANALYSIS OF THE ADMINISTRATION EFFECTIVENESS OF NON TAX REVENUE ON STATE ASSETS AND AUCTION SERVICE OFFICE OF MANADO

Oleh:

Rima P.A Walelang¹

Stanly Alexander²

Steven Tangkuman³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

[wrimaputriniaiditami@yahoo.com¹](mailto:wrimaputriniaiditami@yahoo.com)

[stanly_w.alexander@yahoo.com²](mailto:stanly_w.alexander@yahoo.com)

[stevenjosiatangkuman@gmail.com³](mailto:stevenjosiatangkuman@gmail.com)

Abstrak : Di Indonesia, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak masih kurang dioptimalkan oleh pemerintah sehingga kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2016. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan bea lelang pada KPKNL Manado secara keseluruhan selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Sedangkan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dalam hal ini jenis bea lelang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012. Hanya dalam menatausahakannya ada saja kendala yang dialami, ketika pembeli lelang melakukan wanprestasi. Hal ini bisa mempengaruhi potensi penerimaan bea lelang, karena nantinya uang jaminan masuk ke kas negara diakui sebagai pendapatan jasa lainnya. Saran yang dapat diberikan adalah untuk terus meningkatkan kinerjanya agar pemungutan bea lelang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan agar menetapkan sanksi bagi pembeli-pembeli lelang yang melakukan wanprestasi, meskipun tetap masuk ke kas negara namun hal ini bisa mempengaruhi potensi penerimaan bea lelang.

Kata Kunci : *efektivitas, penatausahaan, penerimaan negara bukan pajak*

Abstract : *In Indonesia, non tax revenue management is still less optimized by the government so that its contribution to the state budget is less than the maximum. The purpose of this research is to analyze the effectiveness and administration of Non Tax Revenue at State Assets and Auction Service Office of Manado during the period of 2013 to 2016. This research was conducted by qualitative descriptive approach. The result of the research shows that the effectiveness of the auction fees on State Assets and Auction Service Office of Manado during the last four years has always increased. While the administration of Non Tax Revenue at State Assets and Auction Service Office of Manado in this type of auction fees has been implemented in accordance with applicable rules that is Regulation of the Director General of State Assets Number PER-07 / KN / 2012. Only in administering there are constraints when auction buyer do the default. This may affect the potential of receiving the auction fee, because the bail will go to the treasury state recognize as other service income. Suggestions that can be given are is to continue to improve its performance in order to collect the auction fees continues to increase from year to year and to set sanctions for auction buyers who default, even if they are still in the state coffers but this can affect.*

Keywords : *effectiveness, administration, non tax revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Demi untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah perlu adanya rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, dimana mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran yang berfungsi untuk mengelola suatu pemerintahan yang efektif dalam mencapai tujuannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum (Munawaroh, 2016).

Salah satu unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, yang diperoleh dari : penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Dikutip dari jurnal internasional (Sharma, 2015) mobilisasi pendapatan melalui penerimaan negara bukan pajak adalah faktor kunci untuk pembangunan.

Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintahan yang baik pula. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi (Natalia, 2012). Memang di Indonesia pendapatan negara yang terbesar berasal dari pajak. Namun, tidak semua orang mengetahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak juga merupakan penyumbang pendapatan negara, walaupun hasil yang diperoleh tidak sebesar pendapatan yang diterima dari pajak dan cukai (Amallia, 2015).

Hal ini dikarenakan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak masih kurang dioptimalkan oleh pemerintah sehingga kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. Berikut ini penulis akan melampirkan Data Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Negara tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 dari tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2014 - 2016

(dalam triliun rupiah)

NO	URAIAN	2014		2015		2016	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Penerimaan Perpajakan	1.143,3	74 %	1.235,8	83 %	1.546,7	84 %
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	390,7	25 %	252,4	17 %	273,8	15 %

Sumber: kemenkeu.go.id,

Berdasarkan dari tabel 1 memperlihatkan perbandingan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang menunjukkan pendapatan negara sangat di dominasi oleh penerimaan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor PNBPN masih kurang dalam kontribusi pendapatan negara.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di salah satu unit operasional yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado. Adapun jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di pungut oleh KPKNL yaitu bea lelang dan biaya pengurusan piutang negara. Dalam hal ini, penulis memilih salah satu dari kedua jenis PNBPN untuk diteliti yakni bea lelang. Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada Penjual dan/atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2016.
2. Untuk mengetahui Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Rasdianto (2013:2), akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan

Sadeli (2015:6) menyatakan akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga non profit atau *institutional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintahan dan organisasi non profit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Surjaweni (2015:56) APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari- 31 Desember) yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pasal 1 Undang-undang Nomor 20/1997 tentang PNBP, penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Kelompok dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tjandra (2006:79) dalam Zakaria (2012) kelompok PNBP terdiri dari:

1. Penerimaan Sumber Daya Alam
2. Pendapatan Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. PNBP Lainnya
4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
 - a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
 - b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
 - c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah.
 - e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
 - f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.
 - g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Teori Efektivitas

Sedarmayanti (2009:59) menyatakan efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.

Konsep Penatausahaan

Penatausahaan uang lelang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Berikut ini adalah tata cara yang dilakukan dalam penatausahaan uang lelang :

1. Tata cara penerimaan
Tata cara penerimaan uang lelang dimulai dari :
 - a. Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang, baik secara tunai atau melalui rekening penampungan lelang.
 - b. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang yang disetorkan secara tunai dan melalui cek/giro.
 - c. Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang.
 - d. Penerimaan Uang Hasil Lelang secara tunai atau rekening penampungan lelang.
2. Tata Cara Penyetoran
3. Tata Cara Pembukuan Penerimaan, Penyetoran, dan Pengembalian Uang Hasil Lelang

Penelitian Terdahulu

Sarwani (2013) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi atas upaya optimalisasi PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa proyeksi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2015 cukup besar, sedangkan efektifitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2009-2011 dengan kriteria tidak efektif.

Hastuti (2015) dan Poyoh *et al* (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Implementasi *Standart Operating Procedure* (SOP) Pada Prosedur Pengelolaan PNBP di PUSDIKLAT MIGAS CEPU untuk mengetahui prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada PUSDIKLAT MIGAS CEPU. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Secara keseluruhan pengelolaan PNBP pada Pusdiklat Migas Cepu telah berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang belum sesuai dengan SOP, tetapi ketidaksesuaian ini masih berada pada tingkat kewajaran yang dapat dimaklumi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado mulai bulan April sampai Mei 2017.

Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah
2. Melakukan survey pendahuluan
3. Mengumpulkan dan mempelajari literature-literature yang berhubungan dengan konsep dasar, teori dan aplikasi
4. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengelola data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi.

Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Target dan Realisasi Bea Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado**

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan bea lelang pada KPKNL Manado dapat dilihat dari Target dan Realisasi Penerimaan Bea Lelang dalam tahun anggaran empat tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan 2016 yang telah diperoleh penulis dalam penelitian di lapangan, yang akan disajikan dalam bentuk tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado

Tahun 2013-2016		
Tahun	Target Bea Lelang	Realisasi Bea Lelang
2013	2.107.300.345	1.316.036.335
2014	3.698.000.000	2.262.854.181
2015	4.437.446.747	4.347.273.827
2016	2.438.000.000	4.500.648.998

Sumber: Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Manado, 2017

Tabel 2 memuat tentang target dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado jenis bea lelang pada 4 tahun terakhir. Penerimaan bea lelang pada tahun 2013 dan 2014 meskipun sudah di atas 50% namun hasil yang diperoleh jauh dari yang sudah ditargetkan. Melihat pengalaman pada tahun sebelumnya, pihak KPKNL terus berusaha agar penerimaan bea lelang bisa mencapai target dari yang sudah ditetapkan. Tidak sia-sia, pada tahun 2015 penerimaan bea lelang mencapai 97,97% sampai dengan tahun 2016 dari target yang sudah ditetapkan, penerimaan bea lelang mencapai 184,60%.

Jenis Penerimaan Uang Lelang

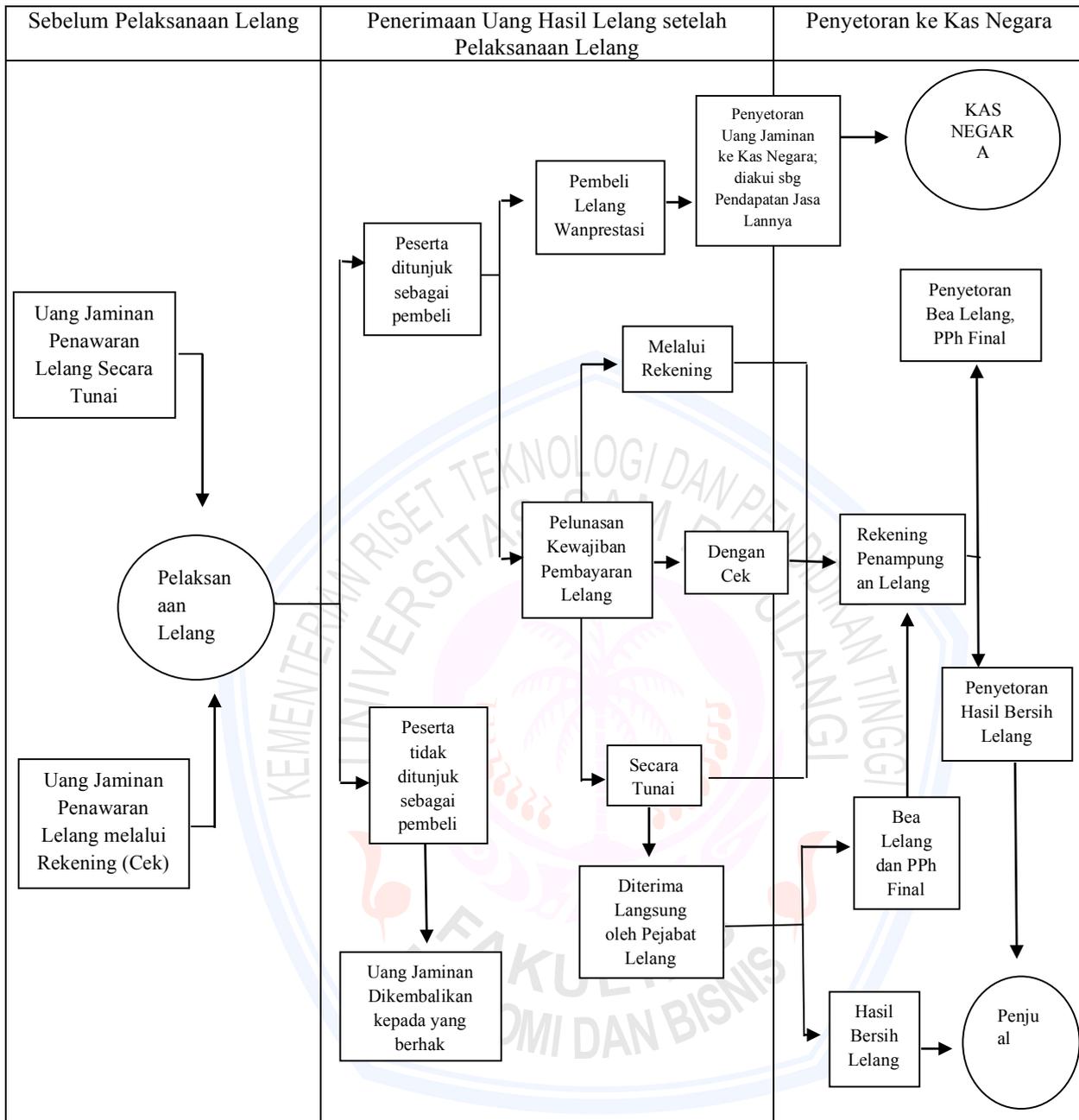
Sebelum mengetahui bagaimana penatausahaan bea lelang, berikut ini penulis akan menjelaskan jenis-jenis penerimaan uang lelang dikenakan dari proses lelang barang sehingga menjadi bea lelang. Jenis penerimaan yang dipungut meliputi :

1. Penerimaan uang jaminan penawaran lelang
2. Penerimaan pelunasan kewajiban pembayaran lelang terdiri dari: hasil bersih lelang, bea lelang penjual, bea lelang pembeli, bea lelang batal dan PPh Final
3. Penerimaan jasa giro

Penatausahaan Uang Lelang

Berikut ini adalah tata cara yang dilakukan dalam penatausahaan uang lelang menurut Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 :

Gambar 1.Flowchart Penatausahaan Uang Lelang



Sumber : Data Diolah, 2017

Pembahasan
Analisis Efektivitas Bea Lelang

Analisis efektivitas yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan bea lelang dengan target bea lelang tahun berjalan. Setelah melakukan perhitungan dengan rumus efektivitas, maka berikut ini penulis akan menampilkan tabel penerimaan bea lelang mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 3.Efektivitas Penerimaan Bea Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado Tahun 2013-2016

Tahun	Target Bea Lelang (Rp)	Realisasi Bea Lelang (Rp)	Efektivitas Bea Lelang (%)	Keterangan
2013	2.107.300.345	1.316.036.335	62%	Cukup Efektif
2014	3.698.000.000	2.262.854.181	61%	Cukup Efektif
2015	4.437.446.747	4.347.273.827	97,97%	Efektif
2016	2.438.000.000	4.500.648.998	184,60%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2017

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2014 realisasi penerimaan bea lelang dikategorikan “cukup efektif” karena belum mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2015 penerimaan bea lelang masuk kriteria “efektif” karena mencapai 97,97%. Pada tahun 2016 penerimaan bea lelang mengalami peningkatan cukup signifikan karena besaran persentasinya sebesar 184,60% maka di tahun anggaran 2016 efektivitas penerimaan bea lelang dikategorikan “sangat efektif”. Dari meningkatnya tingkat efektivitas penerimaan bea lelang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kredit macet semakin meningkat pada 4 (empat) tahun belakangan ini .

Analisis Penatausahaan Bea Lelang

Di dalam melaksanakan penatausahaan bea lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, prosedur yang ada didalamnya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hanya dalam menatausahakan bea lelang ada beberapa kendala yang sering dihadapi seksi pelayanan lelang KPKNL Manado dimana kendala tersebut bisa mempengaruhi potensi penerimaan bea lelang, yaitu dalam hal tata cara pelunasan kewajiban pembayaran lelang ketika pembeli lelang melakukan wanprestasi. Kalau pembeli lelang melakukan wanprestasi, uang jaminan penawaran lelang masuk ke kas negara sebagai “Pendapatan Jasa Lainnya”

Adapun penyebab pembeli lelang melakukan wanprestasi dikarenakan pembeli lelang tidak memenuhi jumlah kewajiban yang harus dibayar dengan waktu yang sudah ditentukan. Meskipun pembeli lelang telah memenuhi waktu yang sudah ditentukan tetapi jumlah kewajiban yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan maka pembeli lelang dinyatakan wanprestasi, begitu juga sebaliknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Efektivitas penerimaan bea lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado di setiap tahunnya mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dalam pemungutan bea lelang adalah efektif.
2. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dalam hal ini jenis bea lelang telah melaksanakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012. Hanya dalam menatausahakannya ada saja kendala yang dialami, ketika pembeli lelang melakukan wanprestasi. Hal ini bisa mempengaruhi potensi penerimaan bea lelang, karena nantinya uang jaminan masuk ke kas negara diakui sebagai “pendapatan jasa lainnya”

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pokok di bidang lelang yang dikenakan Bea Lelang disarankan untuk terus meningkatkan kinerjanya agar pemungutan bea lelang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mengingat Bea Lelang adalah salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dioptimalkan pengelolaannya sebagai salah satu pendapatan negara supaya bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan negara.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado diharapkan terus mempertahankan penatausahaan bea lelang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Juga sebagai masukan, agar menetapkan sanksi bagi pembeli-pembeli lelang yang melakukan wanprestasi, meskipun tetap masuk ke kas negara namun hal ini bisa mempengaruhi potensi penerimaan bea lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amallia, Meita. 2015. *Analisis Sistem PNBP Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pada KPPN Surabaya I*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol. 3 No. 12 Tahun 2015. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/1133>. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Hastuti, Husna. 2015. *Analisis Implementasi Standart Operating Procedure (SOP) Pada Prosedur Pengelolaan PNBP di PUSDIKLAT MIGAS CEPU*. Electronic Theses & Dissertations (ETD). http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=83015&obyek_id=4. Universitas Gadjah Mada
- Munawaroh, Fithriana. 2016. *Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Order Pekerjaan Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UPT. Balai Pengolahan Mineral Lampung-LIPI*. Electronic Theses & Dissertations (ETD). http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=103926&obyek_id=4. Universitas Gadjah Mada
- Natalia, Ria. 2012. *Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012 Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Jakarta*. <http://digilib.esaunggul.ac.id/html>. Universitas Esa Unggul Jakarta. Diakses Desember 11, 2013
- Poyoh, CM., Murni, Sri., dan Tulung, Joy Elly. (2017) Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS dan AKUNTANSI Vol 5 No. 2
- Rasdianto, Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan.
- Republik Indonesia, 1997. *Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Undang-undang No. 20 Tahun 1997.
- Republik Indonesia, 2012. *Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang*. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012
- Sadeli, 2015. *Dasar-dasar Akuntansi*. Edisi Pertama. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sarwani, 2013. *Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Curvanomic Vol. 2 No. 3 Tahun 2013.

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/3540>. Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat. Diakses September 6, 2013.

Sedarmayanti, 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung.

Sharma, Rakesh. 2015. *An Analysis of Non Tax Revenue Buoyancy in India*. International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS) Vol. 5 Issue 5 May, 2015. https://www.researchgate.net/publication/277405207_An_Analysis_of_Non_Tax_Revenue_Buoyancy_in_India. University of Rajasthan Jaipur, India. Diakses Mei 31, 2015

Sujarweni, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Zakaria, Fatmawaty. 2012. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango*. Universitas Negeri Gorontalo

